DINAMIKA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PILKADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

¹Sopian Ependi Manalu, ²Nurul Nurhandjati

Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Correspondence author: sopianmanalu46@gmail.com

Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

Abstract

This study discusses the dynamics of the coalition of political parties carrying a single candidate in the process of nominating the regent and deputy regent in the 2018 North Padang Lawas Regency election. By using Arend Lijphart's coalition theory, it will be elaborated on how the dynamics of forming a coalition of political parties in support of a single candidate pair will be elaborated. Lijphart categorizes coalitions into 2 forms, namely: policy blind coalition and policy based coalition. By using a qualitative method through a case study approach, this research begins with an explanation of the political parties carrying the candidates, the dynamics that occur between political parties, then an analysis of the form of coalition built by the party is supported by political realities to strengthen the results of the author's analysis. The findings of this study indicate that the coalition of political parties carrying a single candidate in the 2018 North Padang Lawas Regency election tends to form a policy blind coalition, namely a coalition that prioritizes maximizing power rather than considering ideological similarities and party platforms. The coalition that is formed tends to be pragmatic, elitist and office seeking oriented. The selection of candidates tends to consider popularity, influence of the central elite and local elites as well as large capital ownership so as to be able to gather all political parties in one coalition block.

Keywords: *Coalition; Political Party; Regional Head Election; Single Candidate*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai dinamika koalisi partai politik pengusung calon tunggal dalam proses pencalonan bupati dan wakil bupati pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018. Dengan menggunakan teori koalisi Arend Lijphart akan di elaborasi bagaimana dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam mendukung pasangan calon tunggal. Adapun Lijphart mengkategorikan koalisi kedalam 2 bentuk yakni : policy blind coalition dan policy based coalition. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini dimulai dari penjelasan partai politik pengusung calon, dinamika yang terjadi antar partai politik, kemudian dilakukan analisis bentuk koalisi yang dibangun oleh partai didukung realita politik untuk menguatkan hasil analisis penulis. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa koalisi partai politik pengusung calon tunggal pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 condong pada bentuk koalisi policy blind coalition yakni koalisi yang mengutamakan untuk memaksimalkan kekuasaan daripada mempertimbangkan kesamaan ideologi dan platform partai. Koalisi yang terbentuk cenderung pragmatis, elitis dan berorientasi office seeking. Penentuan kandidat cenderung mempertimbangkan popularitas, pengaruh elit pusat dan elit lokal serta kepemilikan modal besar sehingga mampu menghimpun seluruh partai politik dalam satu blok koalisi.

Kata Kunci: *Calon Tunggal; Koalisi; Partai Politik; Pemilihan Kepala Daerah*

PENDAHULUAN

Koalisi partai politik merupakan salah satu kajian menarik dalam studi ilmu politik. Menurut Lijphart (1995), koalisi merupakan interaksi kelompok maupun individu yang tergabung dalam struktur organisasi formal kemudian membentuk kerjasama secara independen, diasumsikan saling menguntungkan, serta berorientasi pada isu yang sama dan memerlukan aksi bersama. Di negara-negara yang menganut sistem multi partai, koalisi merupakan sebuah keniscayaan karena partai politik tidak ada satupun partai politik yang mampu berkuasa tanpa berkoalisi dengan partai politik lain (Sumadinata, 2016). Lebih lanjut menurut Riker (1962) koalisi partai politik karena disebabkan kuatnya keinginan untuk mendapatkan kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sebab tujuan utama partai politik menurut Katz dan Mair (2009) ialah untuk menjaga kepentingan mereka demi mempertahankan kekuasaan.

Koalisi tidak hanya terjadi pada pemerintahan di tingkat pusat. Partai-partai politik di tingkat lokal seringkali ditemukan bergabung dalam barisan koalisi untuk mendukung calon, baik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Kondisi demikian sebagai akibat syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan perolehan minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah yang bersangkutan.

Koalisi partai politik dalam pilkada khususnya mengenai calon tunggal merupakan salah satu kajian yang menarik untuk diteliti. Studi yang dilakukan Makhasin (2016) tentang Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah menilai pilkada di Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan bahwa ideologi ataupun pragmatisme memiliki peran penting sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan koalisi. Dalam temuannya, Makhasin (2016) mengklasifikasikan empat tipologi koalisi yaitu Koalisi Kecil-Ideologis (KKI), Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), Koalisi Besar-Ideologis (KBI) dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP). Namun Koalisi Besar Pragmatis (KBP) ialah pilihan yang paling sering ditempuh sedangkan Koalisi Kecil Pragmatis (KKP) cenderung dihindari oleh partai politik sebelum membentuk koalisi. Lebih jelasnya, Makhasin menyebutkan dari 21 daerah pelaksana pilkada, hanya ada empat daerah di mana koalisi dibangun atas dasar kesamaan ideologis sementara itu terdapat 11 daerah memperlihatkan pola pembentukan koalisi yang lebih cenderung dilandasi pragmatisme politik.

Nurhasim (2018) dalam penelitiannya menyebut pola koalisi pada pilkada 2018 cenderung memiliki kesamaan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dalam istilah Nurhasim disebut koalisi nano-nano yakni sebuah koalisi campur aduk, kondisi di mana koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang berbeda-beda. Pola koalisi yang terbangun lebih mengarah pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai dampak syarat pencalonan. Lebih lanjut, aturan tersebut kemudian memicu terjadinya koalisi mayoritas mutlak yang muncul dari kombinasi antara menguatnya dinasti politik dan tingkat elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon yang berani maju. Kemudian Nurhasim (2018) menawarkan tipe koalisi baru untuk melengkapi teori koalisi sebelumnya yakni koalisi kartel. Menurutnya, koalisi kartel disebabkan sejumlah partai politik yang berkoalisi terjebak oleh orientasi pragmatisme. Orientasi koalisi lebih cenderung kontekstual, menyesuaikan perkembangan dan dinamika politik di mana faktor elektabilitas dijadikan sebagai pertimbangan paling dominan. Oleh karena itu, untuk mencapai kemungkinan kemenangan lebih besar pilihan-pilihan rasional yang lebih bersifat pilihan situasional cenderung lebih diutamakan daripada menawarkan alternatif kebijakan kepada pemilih.

Penelitian Mahpudin (2018) tentang Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017 menjelaskan bahwa koalisi partai politik pada Pilkada Banten 2017 cenderung mengarah pada bentuk koalisi *policy blind coalition* yakni koalisi yang menekankan untuk memaksimalkan kekuasaan daripada memperhatikan kesamaan ideologi dan platform partai. Menurut Mahpudin (2018) motivasi koalisi partai politik lebih cenderung bersifat pragmatis, elitis dan oligarkis serta tidak didukung oleh alasan terhadap pemenuhan kepentingan visi dan ideologi partai anggota koalisi. Sementara itu, Fadillah (2019) dalam studi tentang Pembangunan Koalisi Partai Pengusung Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 mencatat bahwa keputusan partai politik untuk berkoalisi mengusung petahana sebagai calon tunggal merupakan pilihan strategis partai di Kabupaten Tangerang. Petahana dinilai memiliki kekuatan dan peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi. Koalisi seluruh partai politik merupakan hasil dari proses yang dibangun oleh petahana melalui politik pembayaran sampingan berupa janji kebijakan, janji keputusan, kepuasan emosional, materi dan efek ekor jas (*coat-tail effect*).

Di lokasi berbeda, Khodijah (2021) dalam tulisan tentang Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2018 memperlihatkan bahwa koalisi partai politik bermotif pragmatis. Pragmatisme partai politik tercermin dengan bergabungnya seluruh partai politik yang terdiri dari berbagai macam ideologi untuk berkoalisi mengusung calon petahana. Koalisi yang terbangun

memperlihatkan dominasi partai politik yang memiliki jumlah kursi mayoritas di DPRD sehingga partai-partai kecil bergabung dalam koalisi. Partai politik tidak berupaya mendorong kader internal untuk ikut berkompetisi karena pertimbangan memenangkan pilkada secara maksimal disertai ketakutan apabila melawan petahana. Pilkada di Kabupaten Lebak juga disertai kegagalan pembentukan koalisi penantang akibat terhambat persyaratan jumlah kursi untuk mengusung calon dan gagalnya calon independen sehingga tidak hadir calon penantang. Secara khusus, kehadiran calon tunggal di Kabupaten Lebak menurut peneliti tidak terlepas dari kuatnya ketokohan lokal. Selain itu, Khodijah juga menggarisbawahi terkait keputusan terakhir untuk berkoalisi menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sehingga seringkali pimpinan partai di daerah bersifat pasif dalam pemberian rekomendasi.

Dari pemetaan penelitian-penelitian tersebut, telah ada kajian yang mengulas tema koalisi partai politik namun belum secara spesifik membahas isu terkait dinamika koalisi partai politik pengusung calon non petahana dalam pilkada calon tunggal. Jika dilihat dari penelitian terakhir hingga penelitian ini ditulis, studi yang dilakukan di pilkada Kabupaten Lebak misalnya, fokusnya tidak mengenai pembentukan koalisi partai politik dengan calon non petahana. Secara umum, sekalipun penelitian-penelitian sebelumnya sudah berusaha menggali tema koalisi partai politik akan tetapi fokus kajian lebih mengelaborasi faktor-faktor yang mendasari koalisi partai politik dalam Pilkada. Makhasin (2016), Nurhasim (2018), Mahpudin (2018), Fadillah (2019), dan Khodijah (2021) dalam penelitiannya memfokuskan koalisi partai politik di pilkada namun belum mengaitkan dinamika pembentukan koalisi partai politik dengan calon non petahana dalam pilkada calon tunggal.

Pada pilkada tahun 2018 terdapat 2 daerah dari 16 daerah pelaksana pilkada calon tunggal dimana kedua pasangan calon berasal dari non petahana yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kajian ini menjadi menarik karena pasangan calon di Kabupaten Padang Lawas Utara memenangi kontestasi sedangkan di Kota Makassar calon tunggal kalah dari kotak kosong. Bupati periode sebelumnya, Bachrum Harahap yang juga merupakan ayah kandung Andar tidak dapat mencalonkan kembali karena telah menjabat selama 2 periode. Dalam penelitian ini penulis akan menyoroti tentang bagaimana dinamika koalisi partai politik pengusung pasangan calon tunggal pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018. Adapun pasangan Andar Amin Harahap-Hariro Harahap didukung oleh koalisi seluruh partai politik pemilik kursi di DPRD. Sebanyak 30 kursi dari 11 partai politik menjadi partai pengusung calon tunggal di mana keduanya berstatus non petahana.

Untuk menjelaskan dinamika koalisi partai politik pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018, penulis menggunakan teori koalisi Arend Lijphart. Lijphart (1984) mengklasifikasikan teori koalisi menjadi dua bentuk yakni : *pertama*, koalisi yang dibangun tidak berdasarkan atas pertimbangan kebijakan (*policy blind coalition*) melainkan hanya

untuk pencapaian kekuasaan. Bentuk koalisi semacam ini menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen (*minimal winning coalition*) dan asumsi partai bertujuan "office seeking" (memaksimalkan kekuasaan). Dalam koalisi ini loyalitas anggota koalisi tidak terjamin dan sulit untuk diprediksi. Kedua, koalisi yang didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy based coalitions*). Bentuk koalisi kelompok kedua menekankan kesamaan preferensi kebijakan (*minimal connected coalitions*) yang terdiri dari partai-partai yang memiliki kedekatan skala kebijakan serta meniadakan *partner* yang tidak penting. Koalisi partai yang dibangun bersifat *policy seeking* yakni mewujudkan kebijakan sesuai dengan kepentingan partai.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Creswell (2015) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah kasus kontemporer. Berdasarkan tujuannya, peneliti studi kasus dapat memilih tipe penelitian seperti studi kasus instrumental (berfokus pada satu isu atau persoalan tertentu), studi kasus kolektif (memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan satu persoalan penting dari berbagai perspektif) dan studi kasus intrinsik berfokus pada kasus itu sendiri karena dianggap unik atau jarang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus instrumental karena peneliti ingin berfokus pada satu persoalan mengenai dinamika koalisi partai politik pengusung calon tunggal pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan. Informan dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (Creswell, 2016). Adapun informan dalam penelitian merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam koalisi partai politik pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mendukung data wawancara dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi-studi terdahulu, artikel berita media cetak dan online, surat keputusan, laporan, hasil penelitian dan hasil evaluasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Media cetak dan online yang dijadikan objek penelitian adalah koran lokal (terbit di Kabupaten Padang Lawas Utara dan sekitarnya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada 2018 digelar di 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota pada tanggal 27 Juni tahun 2018. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu daerah penyelenggara kontestasi elektoral di tingkat lokal. Secara umum, pelaksanaan pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara berjalan lancar tanpa adanya permasalahan yang mengganggu tahapan

pilkada. Kendati demikian, terdapat catatan penting pada tahapan pencalonan kepala daerah. Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan sebagai pilkada bercalon tunggal karena hingga berakhirnya masa pendaftaran hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Meskipun telah dilakukan perpanjangan pendaftaran tidak muncul kandidat alternatif untuk menghambat terjadinya pilkada calon tunggal. Pasangan Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap merupakan satu-satunya kontestan yang mendaftar dari jalur partai politik dan didukung koalisi seluruh partai politik.

Pada gelaran pilkada tahun 2018 sebenarnya terdapat bakal calon bupati jalur perseorangan (Wildan Siregar-Shofiyatun) yang menyerahkan dukungan ke KPU. Namun pendaftarannya ditolak oleh KPU karena tidak memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan tidak dapat menyerahkan formulir model B.2-KWK. Selanjutnya, KPU membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dari jalur partai politik dan jalur perseorangan. Pada tanggal 10 Januari 2018, Andar Amin Harahap berpasangan dengan Hariro Harahap mendaftar ke KPU diusung 11 partai politik. Hingga akhir masa pendaftaran hanya ada satu pasang calon yang mendaftar. Ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 mengamanatkan apabila hingga hari terakhir pendaftaran hanya ada satu pasang calon maka KPU wajib membuka kembali pendaftaran. Pada tahapan ini, bakal pasangan calon Wildan Siregar-Shofiyatun mendaftar ke KPU melalui jalur perseorangan. Akan tetapi pendaftaran mereka ditolak karena calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon bupati/wakil bupati ialah calon yang telah memenuhi syarat dukungan pada tahapan penyerahan dukungan.

Hal yang menarik untuk dikaji dari pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara ialah mengenai dinamika koalisi partai politik dalam mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Calon bupati merupakan petahana walikota Padang Sidempuan periode 2013-2018 namun tidak memanfaatkan keuntungan sebagai petahana untuk bertarung dalam pemilihan walikota Padang Sidempuan periode 2018-2023. Konstelasi politik di Kabupaten Padang Lawas Utara pada pilkada 2018 memperlihatkan adanya fenomena baru di mana seluruh partai politik pemilik kursi di DPRD sepakat berkoalisi mengusung pasangan calon tunggal. Adapun pasangan Andar-Hariro diusung koalisi 11 partai politik yakni partai Golkar, partai Gerindra, PDIP, PKB, partai Nasdem, partai Demokrat, PAN, partai Hanura, PPP, PBB dan PKPI. Berikut ini komposisi partai politik pengusung calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018. Pasangan Calon dan Partai Pengusung pada Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pasangan Calon dan Partai Pengusung pada Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Ideologi Partai
Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap	Partai Golkar (6 kursi)	Nasionalis Sekuler
	Partai Gerindra (4 kursi)	Nasionalis Sekuler
	PDIP (3 kursi)	Nasionalis Sekuler
	PKB (3 kursi)	Pluralis berbasis massa islam tradisional
	Partai Nasdem (3 kursi)	Nasionalis Sekuler
	Partai Demokrat (3 kursi)	Nasionalis-Religius
	PAN (2 kursi)	Pluralis berbasis massa islam modernis
	PPP (2 kursi)	Islam
	PBB (1 kursi)	Islam
	PKPI (1 kursi)	Nasionalis Sekuler
	Partai Hanura (1 kursi)	Nasionalis Sekuler

Sumber : KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan diolah dari berbagai sumber, 2021

Dinamika Koalisi antar Partai Politik

Proses pemasangan Andar Amin Harahap dengan Hariro Harahap diwarnai dinamika politik hingga manuver politik untuk merebut dukungan DPP khususnya di internal partai Golkar. Sebagai partai pendukung utama kandidat, intrik politik lebih menonjol hingga terjadi tarik menarik dukungan dalam menentukan formasi calon kepala daerah yang akan diusung. Meskipun terjadi dinamika di partai lain, akan tetapi tidak sebesar dan sepele dinamika di partai pemilik kursi terbesar tersebut. Sebagian besar partai hanya menjadi pengikut dalam barisan koalisi. Hal ini karena kebijakan DPP bersifat sentralistik sehingga pengurus di daerah hanya menjalankan keputusan yang telah diambil oleh DPP.

Pada awalnya DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara telah memberi rekomendasi kepada pasangan Andar Amin Harahap-Mukhlis Harahap untuk calon menjadi bupati/wakil bupati. Ambisi Mukhlis yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara harus terhenti ketika Hariro dari partai Gerindra memberi sinyal ingin berpasangan dengan Andar. Diketahui Hariro yang kala itu menjabat ketua DPC partai Gerindra dan wakil ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara ingin mencalonkan diri menjadi calon bupati. Namun pada saat itu belum menemukan pasangan karena masih menunggu hasil komunikasi politik dengan partai lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mula Rotua Siregar :

“Setelah itu ada sinyal dari Pak Hariro, Pak Mukhlis dulu kalo tidak ikut wakil tidak apa-apa, yang penting Golkar bersama Pak Andar”(Wawancara dengan Mula Rotua Siregar, Sekretaris DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara).

Di internal partai Golkar terjadi friksi mengenai calon yang akan didukung dalam kontestasi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Konflik perebutan dukungan terjadi antara Riskon Hasibuan dengan Andar yang sama-sama menginginkan didukung partai Golkar. Adapun Riskon sebelumnya merupakan wakil bupati petahana mendampingi Bachrum Harahap selama 2 periode. Adapun Riskon telah terlebih dahulu mendaftar menjadi calon bupati melalui DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara karena memiliki tiket khusus sebagai kader partai. Namun ketika surat rekomendasi akan diberikan ternyata Riskon belum memiliki pasangan sehingga pengurus di tingkat pusat meminta untuk mencari pasangan sebagai wakil bupati. Atas dasar tersebut, DPP partai Golkar kemudian memerintahkan DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencari mitra koalisi dan calon wakil bupati untuk dipasangkan dengan Riskon. Hal ini sebagaimana diungkapkan Mula Rotua Siregar :

"Saat itu ketika Andar-Mukhlis tidak lagi berpasangan, rapat pleno diperluas tidak ada lagi makanya waktu itu pak Riskon mengejar lagi partai ini (Golkar). Dia waktu itu mendaftar di provinsi. Pada saat itu, Riskon merupakan kader partai maka partai Golkar mendukung Riskon. Jadi ketika partai mengusung Riskon, hari itu keluar surat untuk mencari pasangan. Di Golkar 2 kali surat datang, pertama surat untuk mencari pasangan koalisi dan pasangan wakil. Makanya waktu itu Riskon dikeluarkan oleh DPP untuk mencari pasangan dan pasangan koalisi" (Wawancara dengan Mula Rotua Siregar, Sekretaris DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara).

Beberapa informan menyebut Riskon menjadi kandidat yang pertama kali mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar kepengurusan Setya Novanto. Karena merasa kecolongan, kubu Andar berupaya merebut tiket pencalonan dengan bermodal dukungan dari DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara yang diperkuat suara pengurus tingkat ranting dan organisasi sayap partai. Bersama dengan pengurus partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara, Andar berusaha meyakinkan pimpinan di DPP untuk mendukungnya di pilkada. Bahkan Andar harus bolak-balik ke Jakarta untuk melakukan lobi politik agar terjadi peralihan dukungan. Saat itu DPP memiliki pertimbangan memberikan dukungan karena status Riskon sebagai petahana dianggap memiliki popularitas lebih tinggi dibandingkan dengan Andar. Untuk meyakinkan DPP, kubu Andar kembali mengirimkan surat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa peluang memenangkan pilkada akan lebih besar jika partai Golkar mengusung Andar.

Agar mendapatkan gambaran yang utuh mengenai peta politik khususnya mengenai tingkat popularitas dan elektabilitas calon, DPP melakukan survei yang dilakukan Indo Barometer. Hasil survei menyebutkan tingkat elektabilitas Andar berada pada urutan teratas menyusul Riskon di posisi kedua. Belum puas dengan hasil survei tersebut, DPP meminta untuk dilakukan survei kedua oleh Poltracking. Namun hasilnya tetap sama, tingkat elektabilitas Andar masih berada diatas Riskon yaitu sekitar 15% sedangkan Andar mencapai 25%. Mula Rotua Siregar menuturkan:

"Dia (Riskon) waktu itu mendaftar di provinsi. Pada saat itu, Riskon merupakan kader partai maka partai Golkar mendukung Riskon. Saat itu masih gonjang-ganjing, kader

Golkar berpikir saat Riskon sebagai petahana. Setelah dilakukan survei, DPP masih mendukung Riskon. Jadi setelah kita desak datang lagi dari DPP, dia tidak yakin hasil survei indo barometer. DPP menyuruh lembaga survei lain yang berkoalisi dengan Golkar yaitu Poltracking. Pada waktu itu berjumpa dengan Hanta Yuda, maka diadakan survei yang kedua. Hasil survei juga elektabilitas Andar masih diatas Riskon, waktu itu Riskon sekitar 15%, Andar 25%”(Wawancara dengan Mula Rotua Siregar, Sekretaris DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara).

Upaya Riskon menjadi calon bupati akhirnya terhenti ketika partai Golkar mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Andar-Hairo. Kesuksesan mendapatkan restu partai dinilai tidak terlepas dari peran strategis ayahnya, Bachrum Harahap yang memiliki kedekatan dengan pengurus di DPP. Sosok Bachrum merupakan politisi senior partai Golkar sekaligus tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara. Beberapa jabatan strategis pernah diemban Bachrum selama menjadi politisi. Bachrum pernah menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan selama 2 periode yakni periode 1999-2004 dan periode 2004-2009. Sementara di legislatif, Bachrum pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan selama 2 periode yakni 1999-2004 dan 2004-2008. Hal ini sebagaimana diungkapkan Samsul Bahri Daulay:

“Kalau pak Bachrum tetap dia dibelakang, melakukan lobi-lobi internal. Karena dia kan punya nama, dan punya hubungan dekat termasuk dengan kita”. (Wawancara dengan Samsul Bahri Daulay, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Utara)

Selain modal politik dan modal sosial yang cukup kuat, faktor lain yang tidak kalah penting ialah kemampuan finansial kandidat. Keberhasilan mendapatkan tiket pencalonan hampir tidak lepas dari berapa dana yang disetor ke pengurus pusat. Pada akhirnya, dukungan partai akan diberikan kepada calon yang mampu “membayar” lebih tinggi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mula Rotua :

“Tarik-menarik, terakhir isi tas, terakhir kan partai ini isi tas. Ketika isi tas dinaikkan orang itu, kalau berani segini ayo” (Wawancara dengan Mula Rotua Siregar, Sekretaris DPD partai Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara).

Dari partai Gerindra, Hairo menjadi kandidat tunggal yang dicalonkan oleh partai untuk menjadi wakil bupati mendampingi Andar. Hal ini sebetulnya tidak terlepas dari skenario politik yang sedang dijalankan partai Gerindra dan Hairo. Pemasangan Hairo sebagai calon wakil bupati ditujukan sebagai sarana demi mencapai tujuan politik yang lebih besar. Jika berhasil memenangi pilkada 2018, statusnya sebagai wakil bupati akan memberi benefit terhadap tingkat popularitas dan elektabilitas pada kontestasi yang akan datang Padahal jika ditilik pada pilkada 2008, Hairo ketika itu *head to head* dengan Bachrum untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menurut Hairo, kesepakatan untuk berpasangan dengan Andar sudah lama dibangun. Partai Golkar sebagai pemilik kursi paling banyak di DPRD dianggap memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dalam bursa pencalonan. Pertimbangan lainnya karena Andar

sebelumnya pernah menjabat sebagai walikota selama satu periode sehingga tidak dapat mencalonkan kembali di periode mendatang. Partai Gerindra juga meyakini berkoalisi dengan partai Golkar untuk mengusung calon tunggal maka dana dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebesar jika pilkada lebih dari satu pasangan calon. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan menjadikan Hariro menjadi calon wakil bupati memiliki muatan politis untuk menghadapi kompetisi politik di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Hariro sebagai Ketua DPC partai Gerindra:

"Pada saat itu cuma Gerindra dan Golkar yang ada calonnya. Gerindra dan Golkar yang mau mencalon dari orang dalam. Kita Gerindra, Golkar mau lah. Karena suara mereka lebih tinggi. Kita wakilnya, oke. Untuk satu periode. Karena periode berikutnya, beliau kan udah dua periode. Kita kan pertimbangkan faktor umur masih memungkinkan untuk 1 periode lagi. Dengan tidak menghabiskan energi, artinya energi di 2018 nggak begitu keras keluar karena calon tunggal. Begitulah kira-kira kesimpulan analisa waktu itu. Kita mau jadi wakil karena kita yakin 2018 itu calon tunggal" (Wawancara dengan Hariro Harahap, Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara).

Disisi lain, Hariro juga tidak menampik kuatnya peran DPP dalam penentuan calon yang akan diusung. Hariro juga menjelaskan kekuatan finansial berperan penting terhadap pencalonan hingga kemenangan calon kepala daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Hariro:

"Bisa saja itu apa yang diusulkan DPC tapi begitu keluar rekomendasi berbeda dengan DPP. Tapi yang begitu itu biasanya ada historisnya, ada kedekatannya dengan Ketum. Makanya saya tadi ada istilah, siapa yang paling siap, dia pasti menang. Gak ada itu ceritanya gak punya bisa menang" (Wawancara dengan Hariro Harahap, Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara).

Berbeda dengan partai Gerindra yang mengajukan kadernya sebagai calon wakil bupati, dinamika pencalonan di partai lain tidak begitu kentara dan cenderung lebih kontekstual mengikuti perkembangan politik yang ada. Beberapa partai melakukan penjangkaran internal tetapi tampaknya tidak membuka ruang yang lebih luas terhadap kesempatan kader partai untuk ikut berkontestasi di pilkada. Sementara partai lain ikut bergabung dalam koalisi karena mengikuti arahan dari DPP. Pimpinan partai di Jakarta tampaknya telah menjalin komunikasi di tataran elit sehingga cenderung lebih cepat dalam pemberian rekomendasi. PKPI dan partai Hanura misalnya, meskipun hanya memiliki 1 kursi di DPRD justru menjadi partai yang pertama kali memberikan restu dukungan ke pasangan Andar-Hariro. Dukungan PKPI dan partai Hanura diberikan disaat internal partai Golkar sedang terjadi friksi kepada siapa rekomendasi akan diberikan.

Setelah PKPI dan Hanura yang sama-sama memiliki satu kursi di DPRD, PBB tercatat sebagai partai kecil ketiga tercepat yang menyatakan dukungan ke Andar-Hariro. Hal ini terjadi karena partai kecil menengah dinilai lebih cepat melakukan dalam seleksi kandidat dan minim friksi di internal partai. Selain pasangan Andar-Hariro, DPC PBB menyeter nama Zakiuddin dari hasil penjangkaran internal ke DPW. Sementara nama Ahmad Thamrin hanya

sampai tahap uji kelayakan dan kepatutan sedangkan Riskon sempat mengambil formulir pendaftaran namun tidak mengembalikan formulir. Sehingga pencalonannya tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Menurut Samsul Bahri Daulay, pertimbangan jumlah kursi menjadi salah satu pertimbangan utama pemberian dukungan. DPP dinilai juga menghitung kemampuan partai, dengan hanya memiliki 1 kursi dirasa akan lebih nyaman jika bergabung dengan koalisi yang telah dibangun Andar. Selain itu, pertimbangan pemberian dukungan PBB disebabkan faktor kesamaan visi misi pasangan Andar-Hariro dengan AD/ART partai. Meskipun demikian, ideologi bukan menjadi pertimbangan utama masuknya PBB ke dalam koalisi. Bergabung dalam koalisi dianggap lebih rasional disamping karena tidak adanya calon penantang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ketua DPC PBB, Samsul Bahri Daulay :

"Pertama kita tetap mengacu UU, aturan dulu. Mau bertarung kita di keinginan ideologi, tapi kita tidak bisa menafikan peraturan perundang-undangan. DPP juga punya hitungan. PBB itu 1 kursi, logika aja kita mau kemana. Kecuali misalnya sudah ada kandidat lain. Tetap kita harus membutuhkan partai lain. Baru setelah selesai tahapan itu kita bicara di tataran cita-cita. Waktu itu visi misinya cocok sekali dengan PBB, konteksnya dengan AD/ART PBB. Andar hariro lebih dekat dengan ideologi PBB" (Wawancara dengan Samsul Bahri Daulay, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Utara).

Disisi lain, PDIP mengisyaratkan kuatnya peran DPP dalam penentuan kandidat yang akan dicalonkan. Jumlah kursi partai lain akan sangat mempengaruhi keputusan DPP bergabung dalam koalisi. Rekomendasi akan diberikan jika kursi yang dimiliki mitra koalisi mampu mencukupi syarat pencalonan. Disamping itu, popularitas serta kemampuan finansial kandidat juga tidak luput dari paket pemberian tiket pencalonan termasuk menempatkan seseorang apakah di posisikan menjadi calon bupati atau wakil bupati. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imran Harahap :

DPP itu kan memberi mandat, "apa gunanya saya berikan mandat kepada kamu, tapi kamu tidak bisa maju". Maka syarat dari saya dapatkan mandat dari sana. Maka syarat itu DPP sampaikan, sampaikan ke calon, dapatkan dulu fotokopi dukungan dari partai lain. PDIP melihat kursi partai yang mengajak. Kita memperhatikan jumlah kursi. Pertama kalau syarat cukup, isi tasnya juga maka partai wajib menyarankan mencalon sebagai orang nomor 1. Tapi melihat hasil survey partai juga, kalau hasil surveinya tidak bagus ya mending nomor 2" (Wawancara dengan Imran Harahap, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Padang Lawas Utara).

Berbeda dengan PDIP, keputusan untuk mengusung kandidat di partai Nasdem tetap mempertimbangkan usulan yang disampaikan DPW dan DPD. Namun demikian, partai akan merasa lebih percaya diri memberikan dukungan ketika calon yang akan didukung memiliki popularitas dan elektabilitas yang diperoleh melalui hasil survei. Berdasarkan survei yang dilakukan internal partai, Andar menjadi calon dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi sehingga diputuskan untuk mendukung Andar. Hal ini dinilai wajar mengingat *track record*

Bachrum yang telah menjabat selama 2 periode. Figur Bachrum disebut-sebut masih mengakar di masyarakat hingga membuat siapapun calon yang didukung Bachrum pasti menang. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Sapnawati Nasution :

“Kalau itu kan memang dari daerah, dari daerah kita mengusulkan ke wilayah. Itu memang hak daerah. Setelah daerah kemudian disampaikan ke wilayah dan juga melihat calon-calon tadi. Kalau pusat hanya melihat rekom dari wilayah karena kalau pusat gak tau menahu calon dari daerah. Wilayah memakai lembaga survei karena mereka lihat ke daerah siapa yang lebih berpeluang. Kalau hasil survei pada saat itu pak andar, jadi makanya waktu itu partai lebih pas ke pak andar” (Wawancara dengan Sapnawati Nasution, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Padang Lawas Utara).

Selain faktor kemampuan finansial, beberapa calon penantang yang ingin maju berpikir ulang jika harus *head to head* dengan Andar. Partai Nasdem menyoroti minimnya calon alternatif yang maju sebagai penantang disebabkan takut kalah akibat kuatnya pengaruh figur Bachrum. Daripada memaksakan diri tetap maju melawan Andar, akan lebih rasional jika mengurungkan niat menjadi calon. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ketua Sapnawati Nasution:

“Memang waktu itu calon-calon yang muncul gak serius atau mungkin takut karena melawan apa (andar). Dari segi kepemimpinan, masih ada power pada saat itu, ini kan anaknya. Mungkin itu yang membuat calon lain bimbang” (Wawancara dengan Sapnawati Nasution, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Padang Lawas Utara).

Kondisi serupa juga diakui Hariro sebagai calon wakil bupati, dirinya mengakui akan lebih baik jika bergabung dengan Andar karena keinginan untuk memenangi kontestasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hariro:

“Kita pun berat juga. Kenapa saya bilang berat ? Karena incumbent, waktu itu kan masih aktif bapaknya. Kalau ini momennya di 2024, dia gak bisa lagi, kita mungkin berani. Tapi kalau di 2018, bapaknya masih menjabat, ya pasti lah lebih mudah. Maksudnya, harus menang. Jadi makanya kita ambil kesimpulan waktu itu untuk bergabung aja” (Wawancara dengan Hariro Harahap, Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara).

Disisi lain, menurut Taripar Laut, ketiadaan calon penantang juga disebabkan karena Andar melakukan aksi borong partai. Sehingga tidak menyisakan partai politik lain untuk dijadikan kendaraan politik dan berpotensi menutup peluang kandidat lain untuk maju. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Taripar Laut:

“Kebetulan gak ada calon yang serius untuk maju dan seandainya kita gak mengusung beliau tidak ada lagi yang mau diusung. Dibilang terpaksa nggak juga karena memang calon nggak ada yang serius dan semua partai udah diborong oleh pak Andar” (Wawancara dengan Taripar Laut, Ketua DPC PKB Kabupaten Padang Lawas Utara).

Kondisi demikian juga terjadi di PBB yang ikut mendukung Andar karena tidak memiliki alternatif pilihan. Daripada tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dinilai lebih rasional jika ikut bergabung dalam barisan koalisi. PBB bahkan tidak berdaya untuk menentukan kandidat yang akan diusung. Ada keinginan untuk memunculkan calon lain sebagai penantang

namun terhambat pada kemampuan finansial. Hal ini sebagaimana diungkapkan Samsul Bahri :

"Tapi diskusi antar partai itu ada keinginan untuk memunculkan calon lain. Tapi karena ada yang mampu dan serius baik ditinjau dari segi finansial karena semua tidak terlepas dari itu" (Wawancara dengan Samsul Bahri Daulay, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Utara).

Sementara partai Demokrat sempat membuka penjangkaran internal namun hanya dua pasang yang mendaftar yaitu Andar-Hariro dan Parlinsyah Harahap-Rico Rivai Siregar. Rico merupakan kader partai demokrat yang mendaftar untuk mendampingi Parlinsyah. Setelah dilakukan verifikasi, hanya Andar-Hariro yang diteruskan prosesnya ke tingkat provinsi. Sementara, pasangan Parlinsyah-Rico gagal menembus peta kandidasi karena tidak mampu melengkapi persyaratan yang diminta oleh partai demokrat. Dari penjelasan tersebut, tidak tampak upaya sungguh-sungguh dari partai untuk mengusung calon dari internal partai. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Basri Harahap :

"Cuma karena mereka (Parlinsyah-Rico) tidak bisa melengkapi data, jadi kita dukung Andar Hariro" (Wawancara dengan Basri Harahap, Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Padang Lawas Utara)

Hampir sama dengan partai Demokrat, PAN juga melakukan penjangkaran internal. Meskipun bursa pencalonan bupati/wakil bupati dibuka melalui penjangkaran internal akan tetapi hanya satu pasangan yang diusulkan ke DPW dan DPP. Pada awalnya terdapat 5 (lima) bakal calon yang mendaftar ke PAN. Kelima nama tersebut yakni Ahmad Thamrin Harahap/ATH (sebagai calon bupati), Andar berpasangan dengan Hariro dan Parlinsyah berpasangan Rico. Sementara, Riskon ikut mengambil formulir namun tidak mengembalikan sehingga dianggap gugur. Adapun kegagalan Parlin-Rico karena tidak hadir saat mendengarkan visi misi sedangkan ATH menginginkan maju sebagai calon bupati namun tidak diikuti dukungan finansial. Beberapa nama ingin membangun koalisi tandingan bersama ketua DPD PAN, Hermansyah Lubis untuk menjadi calon wakil bupati. Namun menurut Hermansyah, faktor kekuatan finansial menjadi hambatan kandidat potensial untuk mencalonkan diri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hermansyah :

"Sebenarnya calon yang muncul itu banyak, bahkan saya sendiri itu ada 3 yang minta saya jadi wakil. Tapi begitu di dalam gak mampu. Ini kan kembalinya pasangan calon ke dana juga. Walaupun tidak harus menyiram ke masyarakat tentunya mengumpulkan masyarakat untuk sosialisasi juga membutuhkan biaya. Pasangannya nggak ada yang berduit hehehe.. Makanya gak kita lanjutkan, kita putuskan ke andar hariro" (Wawancara dengan Hermansyah, Ketua DPD PAN Kabupaten Padang Lawas Utara).

Lebih lanjut menurut Hermansyah, sebagai partai menengah yang memiliki 2 kursi di DPRD, posisi PAN dalam koalisi besar memiliki tidak begitu dipertimbangkan dibandingkan jika bergabung dengan koalisi partai kecil-menengah. Keikutsertaan PAN dalam koalisi dinilai hanya sebagai pelengkap karena meskipun tidak bergabung dalam koalisi, partai yang ada

telah melewati ambang batas pencalonan. Namun menurut PAN, jika dilihat dari perolehan kursi yang dimiliki di DPRD akan lebih rasional jika ikut dalam koalisi daripada sama sekali tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Hermansyah :

“Makanya kita untuk meyakinkan DPP daripada tinggal ini ketum, ini calon tunggal. 2 kursi itu tidak ada apa-apanya tidak ada artinya nanti kalau kita tidak ikut”
(Wawancara dengan Hermansyah, Ketua DPD PAN Kabupaten Padang Lawas Utara).

Situasi berbeda dialami oleh PPP, ketua DPD PPP, Hajuddin Ritonga menuturkan sedari awal partainya telah membuka diri untuk berkoalisi karena menyadari tidak dapat mengusung pasangan calon sendirian. Panitia penjangkaran PPP mengusulkan nama-nama yang akan didukung oleh PPP dalam pilkada ke DPW dan DPP. Adapun yang diusulkan DPC yaitu Andar berpasangan dengan Hariro, Zakiuddin Harahap, dan Ahmad Thamrin Harahap. Oleh karena kandidat yang akan diusulkan ke DPW harus berpasangan, nama Zakiuddin dan Ahmad Thamrin akhirnya dicoret dari daftar calon karena tidak menyampaikan pasangannya. Padahal panitia penjangkaran telah memberikan kesempatan untuk mencari pasangan namun hingga batas waktu yang ditentukan para calon tidak mengusulkan nama pasangannya. Akhirnya diputuskan rekomendasi PPP diberikan kepada pasangan Andar-Hariro.

Pertimbangan lain pemberian dukungan ke Andar-Hariro karena calon bupati saat itu menerima kontrak politik yang ditawarkan partai. Isi kontrak politik antara PPP dan Andar yakni bersedia menjadi ketua DPC PPP, mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan partai, dan memenangkan PPP dalam pemilu legislatif minimal 1 fraksi. Selain itu, menurut Hajuddin Ritonga, peran DPP sangat menentukan siapa kandidat yang akan diusung partai. Ritonga juga tidak menolak ketika ditanya soal kekuatan finansial sehingga rekomendasi pada akhirnya oleh DPP. Hajuddin Ritonga menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya kekuatan itu di mereka, kalau mereka berkeinginan. Dan kita rasakan itu, khususnya PPP”. “Saat menyampaikan visi misi, kita minta tolong dibantu 10 juta hehehe. Karena yang ke DPP orang itu juga. Kalau yang itu gak tau lah” (Wawancara dengan Hajuddin Ritonga, Ketua DPC PPP Kabupaten Padang Lawas Utara).

Bentuk koalisi partai politik yang dibangun : Bermotif Ideologis atau Pragmatis

Merujuk pada teori koalisi sebagaimana dijelaskan Arend Lijphart yang mengklasifikasikan koalisi menjadi dua kategori yakni *policy based coalitions* dan *policy blind coalitions*, koalisi yang terjadi pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 condong pada bentuk koalisi kedua, *policy blind coalitions*. Bentuk koalisi semacam ini cenderung menekankan untuk memaksimalkan kekuasaan daripada memperhatikan kesamaan ideologi dan platform partai. Hal ini tercermin dari formasi koalisi 11 partai politik pendukung Andar Amin Haharap dan Hariro Harahap. Campuran dari beberapa kepentingan terakumulasi sehingga ideologi dan platform partai tidak menjadi pertimbangan dalam pembentukan koalisi.

Menurut Nurhasim (2018), telah terjadi pergeseran pola koalisi jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Ditemukan fenomena baru dalam bentuk koalisi dalam pilkada tahun 2018. Hal itu ditandai dengan berkumpulnya seluruh partai politik dalam satu blok koalisi mendukung calon tunggal. Partai-partai politik yang terdiri dari berbagai macam ideologi dan platform partai menjadi satu barisan koalisi. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa ideologi partai tidak dijadikan pertimbangan untuk membentuk koalisi. Orientasi pembentukan koalisi lebih cenderung untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*). Koalisi Andar-Hariro terbentuk dari dukungan 30 kursi yang berasal gabungan 11 partai politik. Komposisi koalisi pasangan ini juga mempertegas tidak adanya batasan ideologi dalam berkoalisi. Karena tidak terdapat garis pembeda yang jelas antar partai politik.

Koalisi pasangan Andar-Hariro semakin menguatkan tesis yang menjadi ciri *policy blind coalition* yaitu *pertama*, mengutamakan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen (*minimal winning coalitions*). Bentuk koalisi semacam ini lebih cenderung mengutamakan jumlah kursi partai politik di parlemen daripada memperhatikan ideologi dan platform partai. Dalam kondisi ini, partai politik akan cenderung untuk bekerja sama dengan partai politik lain untuk mengusung kandidat. Dalam konteks pilkada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Andar-Hariro berkepentingan mengumpulkan dukungan seluruh partai politik semaksimal mungkin. Dukungan partai juga digunakan untuk mengontrol dinamika politik sehingga dapat mencegah lahirnya calon penantang. Selain itu, dengan mengontrol seluruh partai politik bermakna legislatif akan lebih mudah dikendalikan karena tidak ada oposisi. Dengan demikian, roda pemerintahan akan berjalan dengan didukung mayoritas partai politik sehingga minim konflik dan lebih cenderung kompromistis.

Ciri kedua, asumsi partai politik bertujuan *office seeking* (memaksimalkan kekuasaan). Dorongan untuk mencari kekuasaan dikontekstualisasikan dengan berkoalisi antar partai manapun sepanjang dapat mencapai tujuan partai. Oleh karena itu, partai politik tidak lagi memperdulikan garis ideologi untuk dijadikan pertimbangan pembentukan koalisi. Akan tetapi, dengan bergabung dalam koalisi berbagai ideologi maka akan semakin mudah mewujudkan kepentingan partai politik. Partai politik hanya ingin memenangi kontestasi sehingga akan membentuk koalisi dengan *partner* koalisi yang memberi peluang kemenangan lebih besar. Kriteria sebagaimana dijelaskan diatas semakin memperjelas bahwa telah terjadi pragmatisme partai politik demi mencapai kekuasaan.

Wujud pragmatisme partai terlihat pula pada proses pembentukan koalisi yang ditopang oleh kehadiran figur. Dalam beberapa kasus bahkan ditemui figur lebih berpengaruh membangun koalisi dibandingkan partai politik sampai penentuan peta koalisi. Hal ini hampir serupa dengan yang terjadi pada koalisi partai politik pengusung calon tunggal di Kabupaten Padang Lawas Utara. Meskipun sempat terjadi friksi di internal partai

hingga adanya tarik menarik dukungan akan tetapi berkat lobi politik sosok figur akhirnya rekomendasi berhasil didapatkan. Akses komunikasi tingkat tinggi yang terjadi di tataran elit yang hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan para petinggi di jajaran pengurus tingkat pusat. Hegemoni keluarga terhadap partai Golkar dan dinasti politik Bachrum juga melatarbelakangi pemberian dukungan partai terhadap Andar.

Faktor dominan lain yang tidak kalah penting ialah kemampuan finansial kandidat. Keberhasilan menarik seluruh dukungan partai politik tidak terlepas dari modal yang dimiliki oleh kandidat. Bahkan salah satu penyebab gagalnya calon penantang disebabkan karena ketidakmampuan kandidat untuk menyediakan modal yang cukup untuk membeli perahu partai politik. Sampai dengan hari jamak kita dengar di masyarakat bahwa untuk mendapatkan restu dukungan dari partai politik membutuhkan modal yang tidak sedikit apalagi calon yang belum memiliki popularitas dan elektabilitas mumpuni.

Ciri lain bentuk pragmatisme partai ialah pemberian dukungan terhadap kandidat yang dinilai mempunyai tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi serta ditopang kemampuan memenangkan kompetisi. Metode paling sering digunakan partai politik untuk mengukur ketiga ciri tadi adalah dengan melakukan survei. Selain untuk melihat pemetaan politik, survei digunakan sebagai pertimbangan politik bagi partai politik pemberian dukungan. Perilaku partai politik tersebut semakin memperkuat argumen bahwa ideologi atau platform partai bukan sebagai kriteria utama mengusung calon. Bahkan kader partai dan status sebagai petahana diabaikan begitu saja ketika pragmatisme tidak lagi dapat dibendung. Kompromi politik antar partai politik dengan calon pada akhirnya menegaskan kehadiran kader internal partai.

Menurut Nurhasim (2018), telah terjadi koalisi kartel (*cartel coalition*) yang disebabkan kuatnya keinginan untuk memenangi kompetisi dan takut kalah sehingga tidak ada calon lain yang berani maju atau partai yang ada berhitung ulang untuk mendukung calon. Dalam kasus koalisi partai politik di pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara koalisi mayoritas mutlak dipengaruhi beberapa faktor, *pertama*, menguatnya dinasti politik sehingga tidak terbuka ruang kompetisi yang cukup bagi calon lain untuk maju. *Kedua*, pertemuan antara dinasti politik dengan politik elektabilitas berdampak pada keberanian calon untuk memberi alternatif pilihan. *Ketiga*, kombinasi kuatnya keinginan untuk memenangi pilkada ditopang kemampuan finansial untuk melakukan aksi borong partai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara mengarah pada pragmatisme politik. Bentuk koalisi yang terbangun cenderung mengarah pada *policy blind coalition*, di mana kesamaan ideologi dan platform partai tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk membentuk koalisi. Bangunan koalisi cenderung bersifat pragmatis, elitis, dan lebih condong mengarah *office seeking*. Partai politik dalam penentuan calon yang akan diusung sangat mempertimbangkan tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat yang didapat dari hasil survei. Selain itu, pemberian dukungan partai politik juga dipengaruhi oleh kedekatan dengan elit baik di pusat maupun di daerah. Demi mencapai tujuannya, partai politik yang terdiri dari berbagai variasi ideologi tidak mampu membendung kuatnya keinginan untuk memenangkan kontestasi yang ditopang oleh dukungan

REFERENSI

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza. 2012. *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Jakarta: Alfabeta.
- Fadillah, Khoerun Nisa. (2019). *Pembangunan Koalisi Partai Pengusung Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018*. Depok: Universitas Indonesia.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Geddes, Barbara. (1994). *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*, Berkeley: University of California Press.
- <https://www.harian9.com/2017/08/pasangan-andar-hairo-ambil-formulir.html>. [Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021]
- <https://utamanews.com/pemilukada/ATH-Ambil-Formulir-Pendaftaran-Cabup-dari-DPC-PDI-P-dan-Nasdem-Paluta>. [Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021]
- <https://www.harian9.com/2017/09/partai-gerindra-paluta-buka-penjangkaran.html>. [Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021]
- <https://utamanews.com/pemilukada/Tiga-Bacabup-Sepakat--Cabup-Cawabup-Harus-Bebas-Narkoba>. [Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021]
- https://medanbisnisdaily.com/news/read/2017/08/26/316337/parlinsyah_daftar_ke_gerindra/
- <https://www.harian9.com/2017/07/h-hamsir-siregar-ambil-formulir.html>. [Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021]
- <https://www.metro-online.co/2017/09/ketua-golkar-paluta-pastikan-tak-ikut.html>. [Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021]

-
- Katz, R.S. and Mair, P. (2009). *The Cartel Party Thesis: A Restatement, Perspectives on Politics*, 7(4), pp. 753–766.
- Khodijah, Siti (2020). *Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.19 No.2 Tahun 2020 Hal.177-187.
- Lijphart, Arend. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven: Yale University Press.
- Mahpudin, S.K.D dan Hamid, Abdul. (2018). *Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017*. Pros.Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan.
- Makhasin, Lutfhi. (2016). *Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.19, No.3.2016. 234-250.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Michels, Robert. (1984). *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nurhasim, Moch. (2018). *Koalisi "Nano-Nano" Pilkada Serentak 2018*. Jurnal Penelitian Politik Vol. 15, No. 2, Desember 2018.
- Priddam, Geoffrey. (1987). "Coalition Behaviour and Party Systems in Western Europe: A Comparative Approach".
- Sumadinata, R.W.S. (2016). *Dinamika Koalisi Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*. Jurnal Wacana Politik. Vol.1, No.2, 2016:183-188.
- Wardani, Sri Budi Eko. (2007). *Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006*. Jakarta: Universitas Indonesia.